

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI WILAYAH MALANG RAYA
(STUDI KASUS 3 KABUPATEN/KOTA DI MALANG
RAYA TAHUN 2007-2016)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

FRANCISKA YUNIARTI

145020101111080



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI WILAYAH
MALANG RAYA
(STUDI KASUS 3 KABUPATEN/KOTA DI MALANG RAYA TAHUN
2007-2016)**

Yang disusun oleh :

Nama : Franciska Yuniarti
NIM : 145020101111080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 Juli 2018.

Malang, 4 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA

NIP 197101111998021001

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI WILAYAH RAYA
(STUDI KASUS 3 KABUPATEN/KOTA DI MALANG RAYA TAHUN 2007-2016)**

Franciska Yuniarti*, Moh. Khusaini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email: siskafranciska19@yahoo.com.com

**Email: mohkhusaini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel yang menggunakan program eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara keseluruhan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

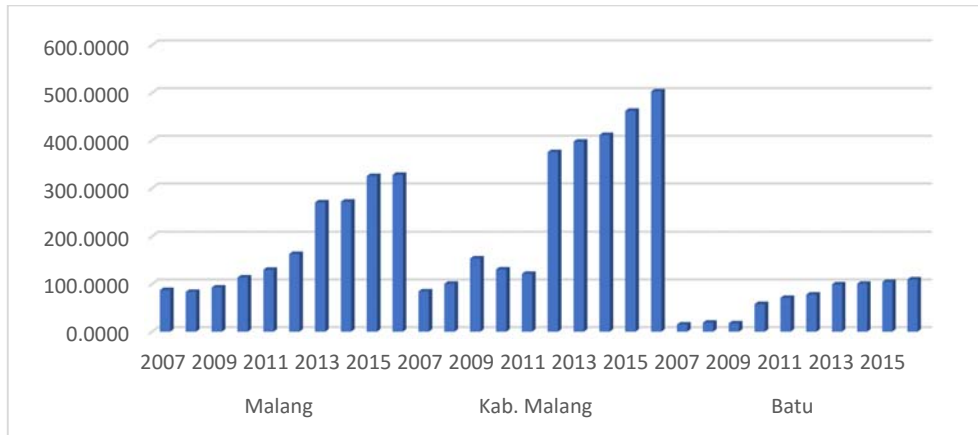
Kata kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal.

A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan hak dan wewenang untuk bisa mengatur dan mengurus sendiri segala keperluan di daerahnya. Untuk bisa melaksanakan otonomi daerah dengan baik, setiap daerah diharuskan untuk bisa menggali dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu jenis pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah lainnya. Hasil penerimaan PAD nantinya digunakan untuk membiayai belanja daerah, salah satunya adalah belanja modal. Selain dari PAD, pendapatan daerah lainnya yang bisa digunakan membiayai belanja modal adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari dana APBN. Semakin tinggi pendapatan yang diterima maka semakin tinggi pula belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PAD, data realisasi Dana Perimbangan, dan data realisasi Belanja Modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016 yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Pada gambar 1 dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2008 menurun dari tahun sebelumnya dari Rp 87,115,7 Milyar menjadi Rp 83,403,6 Milyar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2010 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 130,466,0 Milyar, dan juga pada tahun 2011 menjadi Rp 121,130,9 Milyar. Realisasi Pendapatan Daerah di Kota Batu selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 17,386,7 Milyar. Dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD untuk daerah Malang Raya cenderung meningkat di setiap tahunnya.

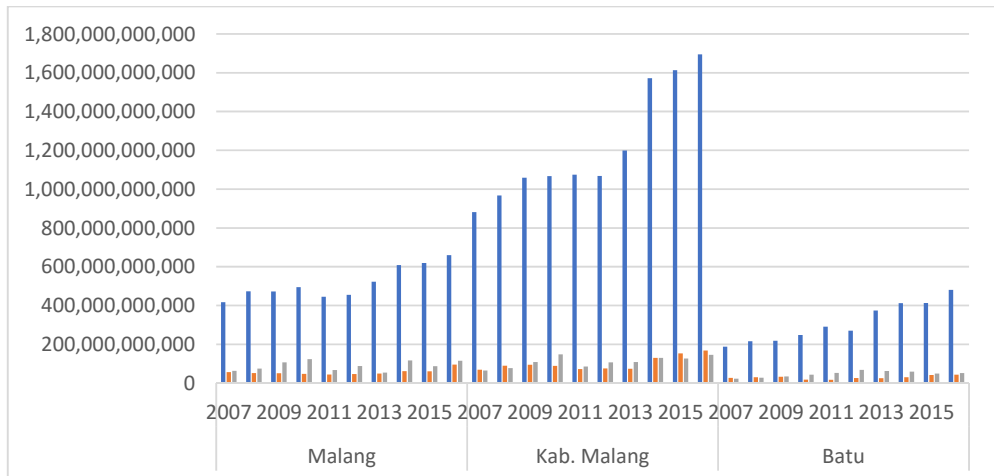
Gambar 1: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Malang Raya Tahun 2007-2016 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Selain dari PAD, komponen penerimaan lain yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan ini berasal dari APBN yang nantinya akan diberikan ke setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya. Setiap daerah mendapatkan pengalokasian Dana Perimbangan yang berbeda-beda karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pada gambar 2 dijelaskan bahwa realisasi Dana Perimbangan di wilayah Malang Raya cenderung selalu meningkat di setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam membantu daerah untuk bisa mencukupi kebutuhan daerahnya masih sangat besar.

Gambar 2: Data Realisasi Dana Perimbangan Dana Perimbangan Malang Raya Tahun 2007-2016 (dalam Milyar Rupiah)

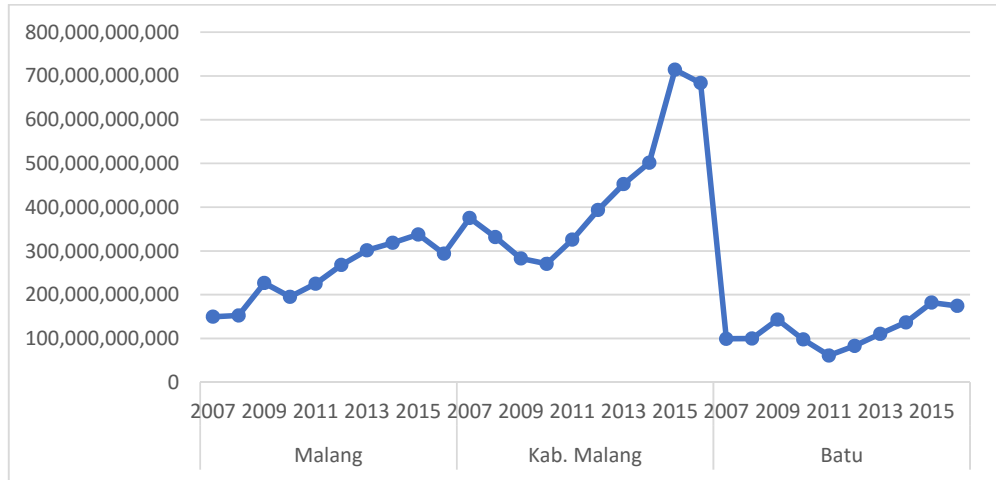


Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Besarnya penerimaan PAD dan Dana Perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran APBD guna

menambah aset tetap. Pada gambar 3 dijelaskan bahwa realisasi belanja modal di Wilayah Malang Raya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja di beberapa tahun mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2016, secara bersama-sama realisasi belanja modal di wilayah Malang Raya mengalami penurunan.

Gambar 3: Data Realisasi Belanja Modal Malang Raya Tahun 2007-2016 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dijelaskan sebelumnya bahwa semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah, maka belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu Dana Perimbangan yang meningkat juga berpengaruh pada peningkatan belanja modal, karena Dana Perimbangan juga merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pemerintah pusat. Akan tetapi hal itu tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Seperti terlihat pada gambar 1, pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah daerah Malang Raya meningkat dari tahun sebelumnya, dan juga pada gambar 2 pada tahun 2016 Dana Perimbangan di daerah Malang Raya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi hal itu tidak didukung oleh peningkatan belanja modal pada tahun 2016, karena pada tahun 2016 belanja modal di daerah Malang Raya justru menurun. Dengan adanya realita seperti itu maka dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini untuk bisa mengetahui pengaruh dari PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konsumsi

Keynes berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima (Case & Fair, 2007). Perbandingan jumlah pendapatan dengan jumlah konsumsi disebut kecenderungan mengkonsumsi atau *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Semakin tinggi tingkat MPC suatu rumah tangga/daerah maka semakin tinggi pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya. Untuk memperkuat pernyataan tersebut dibutuhkan adanya perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan absolut. Teori tersebut menyatakan jumlah konsumsi sangat erat hubungannya dengan pendapatan negara yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara yang diukur dari harga konstan.

Menurut Irving Fisher, seseorang melakukan konsumsi dengan mempertimbangkan keadaan pada saat ini dan keadaan pada saat yang akan datang. Kedua keadaan atau kondisi ini menentukan jumlah seberapa besar pendapatan yang akan disimpan dan seberapa besar pendapatan yang akan dikeluarkan untuk melakukan konsumsi. Sementara itu, Milton Friedman berpendapat bahwa jumlah konsumsi yang dibutuhkan seseorang bergantung pada pendapatan permanen seseorang tersebut. Yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah pendapatan dalam jangka

panjang atau pendapatan rata-rata. Rumusan untuk fungsi konsumsi dan pendapatan menurut Friedman adalah $C = cYP$, $\rightarrow c = MPC$, $YP =$ pendapatan permanen. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata konsumsi bergantung pada rasio pendapatan permanen juga pendapatan sekarang.

Dari ketiga pendapat tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu negara ataupun daerah sangat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan oleh negara atau daerah tersebut. Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran adalah teori konsumsi dari Keynes karena teori ini sangat mampu untuk bisa menjawab dari semua rumusan masalah yang telah disebutkan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah meringankan beban pemerintahan pusat dari urusan-urusan domestik atau urusan-urusan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan proses pemberdayaan. Secara khusus, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu juga bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih baik lagi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun kestabilan politik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelian barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Belanja modal juga merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam APBN/APBD. Tujuan dari dikeluarkannya belanja modal adalah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bisa didapatkan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002). Untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik maka diperlukan tingkat PAD yang tinggi pula. Hal tersebut dikarenakan tingginya Pendapatan Asli Daerah suatu daerah menggambarkan kemandirian daerah sebagai wujud dari adanya otonomi daerah, sehingga nantinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dari pemerintah pusat akan berkurang.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2014). Menurut Widjaja (2002), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

membayai kebutuhan pengeluarannya untuk melaksanakan desentralisasi. Menurut UU tersebut besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dari Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan pembayaran gaji PNS yang telah ditetapkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus dari daerah tersebut, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Yang termasuk dalam kebutuhan khusus antara lain seperti kebutuhan yang tidak termasuk dalam perhitungan rumus Dana Alokasi Umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam upaya untuk mengatasi kurangnya sumber penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6 dan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 12 yang berisi mengenai penyediaan Dana Bagi Hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas 2 jenis (Kuncoro, 2014), antara lain:

1. Penerimaan Pajak, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - c. PPh Orang Pribadi.
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA) yang meliputi:
 - a. Sektor Kehutanan.
 - b. Sektor Pertambangan Umum.
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam.
 - d. Sektor Perikanan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi APBD Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu tahun 2007-2016. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_t$$

Di mana:

BM = Belanja Modal

β_0 = konstanta

i = daerah ke

t = tahun pengujian (2007, 2008, 2009, ..., 2016)

- β_1 = koefisien regresi PAD
- β_2 = koefisien regresi DAU
- β_3 = koefisien regresi DAK
- β_4 = koefisien regresi DBH
- e = kesalahan pengganggu (*error of term*)

Uji signifikansi variabel bebas dilihat dengan melihat tabel hasil regresi. Jika nilai probabilitasnya di bawah $\alpha = 5\%$, maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

D. PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Y). Metode yang digunakan adalah regresi panel dengan model *Common Effect* dengan taraf kesalahan maksimal (alpha) sebesar 5%. Model regresi berdasarkan hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 1: Hasil Estimasi Regresi Data Panel secara Keseluruhan

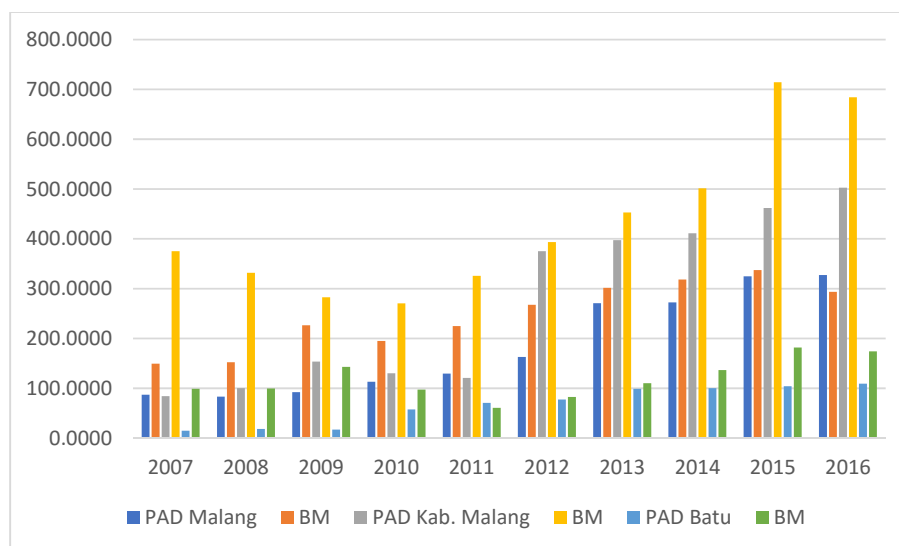
Variabel	Coefficient	Probability
C	42.59930	0.0707
PAD	0.442489	0.0003
DAU	0.153928	0.0157
DAK	1.495000	0.0410
DBH	-0.636924	0.1280
R-squared	0.931027	

*Koefisien signifikansi pada tingkat 5% (persen)
 Sumber : Data diolah, 2018

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, diperoleh hasil uji regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,442489 dengan t sebesar 4,255204 dan probabilitas $0,0003 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya. Hasil ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Berikut grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 4: Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Pengalokasian belanja modal digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yaitu bangunan, peralatan, insfrastruktur, dan harta tetap lainnya (Darwanto & Yulia, 2007). Setiap tahunnya pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk mengganti aset lama ataupun untuk pembelian aset baru sehingga aset tetap pemerintah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBD yang merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahunnya.

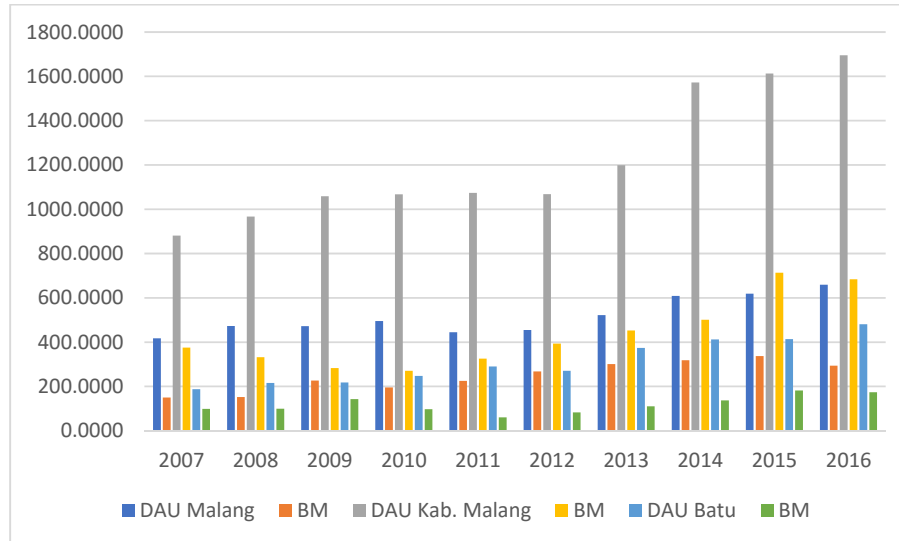
Hasil penelitian tersebut didukung oleh beberapa kemajuan-kemajuan di wilayah Malang Raya. Salah satu contohnya adalah perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan di daerah yang sudah menunjukkan kemajuan menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kota Malang, terdapat beberapa daerah yang mengalami pelebaran jalan raya guna untuk mengurangi kemacetan di Kota Malang. Hal tersebut membuktikan bahwa pengalokasian PAD digunakan dengan baik untuk membiayai belanja modal di wilayah Malang Raya salah satunya untuk perbaikan dan pelebaran jalan untuk warga Malang Raya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008), Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,153928 dengan t sebesar 2,591562 dan probabilitas $0,0157 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah

tersebut. Berikut grafik Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 5: Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

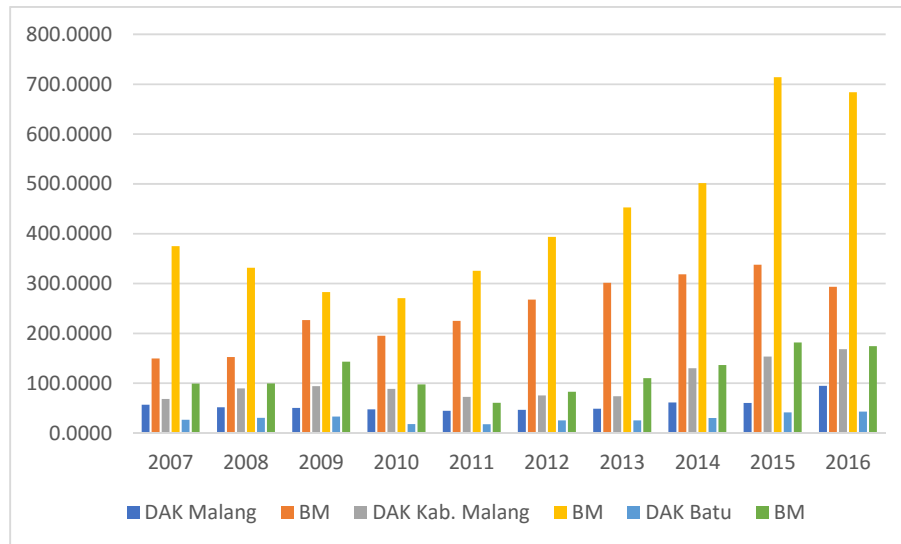
Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengurangi ketimpangan yang ada di daerah. Salah satu masalah ketimpangan adalah kemiskinan. Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Malang Raya. Contohnya adalah di Kota Batu, pemerintah Kota Batu memiliki program pengurangan kemiskina yaitu memberikan bantuan uang tunai untuk warga miskin dan penyandang cacat. Bantuan tersebut berupa santunan untuk warga miskin Rp 500.000, per bulan dan Rp 500.000, per bulan untuk penyandang cacat, dan mereka juga mendapat beras. Pemerintah Kota Malang juga memiliki program untuk menekan angka kemiskinan seperti bedah rumah, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satu contohnya adalah pemberdayaan masyarakat di Kampung Warna-Warni. Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu salah satunya berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada warganya yang miskin.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syukriy dan Halim (2006), Haryanto (2013), Abdullah dan Halim (2002), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,495000 dengan t sebesar 2,1574116 dan probabilitas $0,0410 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Berikut grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 6: Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



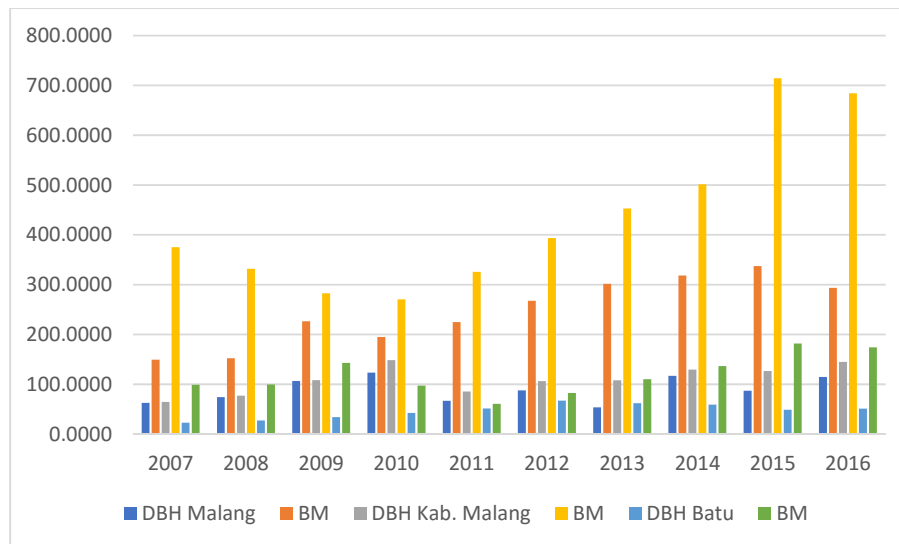
Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Salah satu contoh pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah penggunaannya dalam program pendidikan di wilayah Malang Raya. Kota Malang memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya masih lemah. Salah satu contoh yang paling baru adalah dikeluarkannya bus sekolah sebagai kendaraan gratis untuk menuju sekolah. Pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan bantuan dalam sector pendidikan berupa pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu. Pemerintah Kota Batu juga memberikan bantuan bagi sector pendidikan yaitu bantuan untuk renovasi bangunan sekolah-sekolah yang kurang layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nugraeni (2011), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008), Wandira (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar -0,636924 dengan t sebesar -1,574116 dan probabilitas 0,1280 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini menjelaskan bahwa besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016 tidak berpengaruh pada pengalokasian belanja modal, dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari Keynes yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima. Berikut grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 7: Grafik Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk belanja daerah lain yang tidak termasuk dalam belanja modal dan tidak terdapat penelitian ini. Salah satu contohnya adalah hampir setiap hari Minggu selalu diadakan berbagai macam acara di Kota Malang tepatnya di sekitaran Balai Kota Malang. Mulai dari acara jalan sehat, pengajian, bazar, hingga konser music yang bukan termasuk dalam komponen belanja modal.

Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, diketahui hasil uji statistic F menunjukkan nilai signifikansi $0.000000 < 0.05$, yang berarti bahwa secara serentak atau secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai PAD yang didapat maka semakin tinggi jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan kemajuan-kemajuan di wilayah Malang Raya. Salah satu contohnya adalah perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan di daerah yang sudah menunjukkan kemajuan menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kota Malang, terdapat beberapa daerah yang mengalami pelebaran jalan raya untuk mengurangi kemacetan. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAU yang diterima maka semakin tinggi jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Pengalokasian DAU digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Malang Raya guna menekan angka kemiskinan. Pemerintah di Wilayah Malang Raya memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat miskin dan cacat untuk memenuhi kebutuhan mereka agar masyarakat bisa hidup sejahtera. DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAK yang diterima maka semakin tinggi

jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Pengalokasian DAK digunakan untuk mendukung program pemerintah daerah di sektor pendidikan. Contohnya adalah dengan pengadaan bus sekolah, pemberian seragam gratis, dan pemberian bantuan untuk renovasi sekolah. Bantuan-bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempermudah proses belajar mengajar khususnya bagi siswa yang kurang mampu. DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DBH yang diterima tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal, dikarenakan DBH tidak digunakan untuk membiayai selain belanja modal. Salah satu contohnya digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang diadakan di wilayah Malang Raya, yang dimana kegiatan tersebut tidak termasuk dalam belanja modal. Secara keseluruhan PAD, DAK, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya tahun 2007-2016.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga diharapkan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah dengan menggali potensi daerahnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna semakin meningkatkan belanja modal.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti peran pemerintah pusat masih cukup besar dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi belanja modal. Disini pemerintah diharapkan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki untuk bisa meningkatkan penerimaan daerah agar mampu meminimalkan peran pemerintah pusat dalam mencukupi belanja modal.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang berarti pemerintah diminta untuk menggali atau meningkatkan faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk membantu mencukupi belanja modal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbagai pihak yang telah membantu baik orang tua, saudara-saudara bahkan teman-teman sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17-32.
- Case, Karl E & Ray, C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan. 2018. <http://djp.k.depkeu.go.id> diakses pada tanggal 1 Februari 2018.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.

- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika. Terjemahan: Mangunsong, Buku 2, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David & Priyo, Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Per Kapita. *Makassar: Simposium Nasional X*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nuarisa, Sheila Ardian. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765*.
- Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kanupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika UPY Vol. 8*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2004. *Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 Pemda Jakarta*.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol.1, No.2 Juli*.
- UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 34 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal. Vol. 1 (3)*.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Salemba Empat.